



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIT KERJA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IIP ILHAM FIRMAN
2. Jabatan : ASISTEN KASN
3. NHK : 409054

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.075.000.000

1. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 530.000.000
2. Tanah Seluas 357 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 598 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000
6. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 169 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 233.000.000

1. MOTOR, HONDA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 250.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 62.378



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.558.062.378
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.558.062.378

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.